

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Dalam peta tradisi Teori Ilmu Sosial terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu dari pendekatan yang terdapat dalam ilmu sosial itu adalah fenomenologi. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Peranan fenomenologi menjadi lebih penting ketika di tempat secara *praxis* sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat. Namun demikian implikasi secara teknis dan *praxis* dalam melakukan pengamatan aktor bukanlah esensi utama dari kajian fenomenologi sebagai perspektif.

Fenomenologi Schutz sebenarnya lebih merupakan tawaran akan cara pandang baru terhadap fokus kajian penelitian dan penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam penelitian secara khusus dan dalam kerangka luas pengembangan ilmu sosial. Dengan demikian, fenomenologi secara kritis dapat diinterpretasikan secara luas sebagai sebuah gerakan filsafat secara umum memberikan pengaruh emansipatoris secara implikatif kepada metode

penelitian sosial. Pengaruh tersebut di antaranya menempatkan responden sebagai subyek yang menjadi aktor sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pemahaman secara mendalam tentang pengaruh perkembangan Fenomenologi itu sendiri terhadap perkembangan ilmu sosial belum banyak dikaji oleh kalangan ilmuwan sosial. Pengkajian yang dimaksud adalah pengkajian secara historis sebagai salah satu pendekatan dalam ilmu sosial. Salah satu ilmuwan sosial yang berkompeten dalam memberikan perhatian pada perkembangan fenomenologi adalah Alfred Schutz. Ia mengkaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial.¹

Posisi pemikiran Alfred Schutz yang berada di tengah-tengah pemikiran Fenomenologi murni dengan ilmu sosial menyebabkan buah pemikirannya mengandung konsep dari kedua belah pihak. Pihak pertama, fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang bernuansakan pemikiran metafisik dan transendental pada satu sisi. Di sisi lain, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala-gejala dalam dunia social tersebut tidak lain merupakan obyek kajian formal (*focus of interest*) dari fenomenologi sosiologi. Salah satu ilmuwan sosial yang berkompeten dalam memberikan perhatian pada perkembangan fenomenologi adalah Alfred Schutz. Ia mengkaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial.²

¹ Schutz, Alfred, 1967, *The Phenomenology of The social World, German: Der sinnhafi Aufbau Der Sozialen*.

² Paul Jhonson, Doyle. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Selain Schutz, sebenarnya ilmuwan sosial yang memberikan perhatian terhadap perkembangan fenomenologi cukup banyak, tetapi Schutz adalah salah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Selain itu Schutz menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial. Dengan kata lain, buah pemikiran Schutz merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat.³

Menurut Schutz sangatlah penting kesadaran dan ilmu pengetahuan, karena apa yang dipaparkan oleh Schutz kalau di analisis dalam politik kekerasan yang terjadi di desa ketapang laok, disana memang sangatlah kurang kesadaran masyarakat dalam berpolitik, karena seandainya mereka sadar mungkin tidak akan terjadi yang namanya kekerasan, seandainya mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya itu menyimpang dari hukum agama dan hukum positif mungkin kekerasan itu tidak akan terjadi, jadi kalau disimpulkan atau disingkronkan dengan teorinya Schutz terjadinya kekerasan di desa ketapang laok tersebut kurangnya kesadaran dalam masyarakat. Dan juga ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan disini juga sangat penting dalam hidup bermasyarakat karena ilmu yang akan membawa kita dalam keadaan keteraturan dan

³ Soekanto, Soerjono. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

sebagainya tanpa ilmu kita akan buta atas segalanya. Coba kita bayangkan orang yang mempunyai ilmu pasti akan berbeda dalam bertindak karena orang yang berilmu itu akan lebih banyak berfikir untuk bertindak, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat didesa ketapang laok berpikiran positif itu sanagtlah minim jadi kalau disimpulkan dengan terjadi politik kekerasan tersebut masyarakat desa ketapang masih kurang ilmu penegetahuannya khususnya alam ilmu politik, karena seandainya mereka tahu apa sebenarnya politik itu dan tujuan politik kemungkinan besar kejadian kekerasan tersebut bisa tidak terjadi.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Kekerasan

Menurut Johan Galtung, kekerasan itu ada bila manusia dipengaruhi oleh keinginan yang kuat untuk menyakiti, sehingga realitas jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya⁴. Berbicara tentang kekerasan politik, tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang kekerasan politik yang terjadi dalam pemilihan umum. Kekerasan politik dalam pemilihan umum, telah melanggar hak asasi manusia. Baik kekerasan yang dilakukan antar massa, (horisontal) maupun kekerasan yang dilakukan oleh aparat (vertikal). Ataupun kekerasan personal, maupun kekerasan struktural. Meskipun data yang ada dalam laporan pelanggaran.

⁴Jurnal. Johan Galtung, “Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian”, dalam Mochtar Lubis, *Menggapai Dunia Damai*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm, 140.

Galtung menyatakan bahwa level potensial untuk merealisasikan adalah pengetahuan dan sumber daya. Apabila pengetahuan dan/atau sumber daya dimonopoli oleh kelompok atau kelas atau digunakan untuk tujuan lainnya, maka tingkat yang aktual akan turun di bawah yang potensial, dan kekerasan hadir dalam sebuah sistem. Sebagai tambahan atas konsep kekerasan yang tidak langsung ini, Galtung juga menjelaskan bentuk kekerasan langsung, yaitu ketika tujuan untuk melakukan realisasi (seperti integritas fisik/psikologis seperti paramedis, infrastruktur fisik seperti rumah sakit, sekolah) tidak dilakukan namun dirusak. Ketika terjadi peperangan, terjadi kekerasan langsung dimana pembunuhan atau pencideraan seseorang dipastikan menempatkan realisasi somatis aktual (*actual somatic realization*) di bawah realisasi somatis potensial (*potential somatic realization*). Namun dimungkinkan pula terjadi kekerasan tidak langsung, ketika pengetahuan dan sumber daya disalurkan jauh dari upaya konstruktif untuk mendekati yang aktual kepada yang potensial.⁵

Selanjutnya, Galtung membagi kekerasan dalam tiga kategori, yaitu Kekerasan Langsung (antara Pelaku-Korban), Kekerasan Struktural (yang bersumber dari struktur sosial antar orang, masyarakat, kumpulan masyarakat (aliansi, daerah)), dan dibalik keduanya Kekerasan Kultural (simbolis dalam agama, ideologi, bahasa, seni, pengetahuan, hukum, media, pendidikan; gunanya melegitimasi Kekerasan Langsung

⁵Jurnal. Johan Galtung, *Violence, Peace, and Peace Research*, Journal of Peace Research, Vol 6 No 63 (1969), hal.168. Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. 64-65

dan Kekerasan Struktural). Kekerasan Kultural dan Kekerasan Struktural menyebabkan kekerasan Langsung. Kekerasan Langsung juga menguatkan/memperburuk Kekerasan Struktural dan Kekerasan Kultural. Kekerasan Langsung berupa fisik atau verbal tampil sebagai perilaku yang tidak berubah, karena akarnya adalah struktur dan budaya.⁶

Pemilihan Umum lebih menunjukkan bahwa kekerasan politik dalam pemilihan umum di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh aparat, dengan motif menegakkan hukum.⁷ Hal ini bisa kita lihat dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum yang selalu diwarnai dengan kecurangan-kecurangan politik. Contohnya, pemanfaatan milik negara oleh golongan tertentu. Meluasnya kolusi antara aparat dengan kontestan tertentu untuk mendapatkan kemudahan dalam proses pemilihan umum.

Akhirnya, yang lebih memprihatinkan ialah merebaknya intimidasi terhadap pemilih supaya menjatuhkan pilihannya kepada kontestan tertentu.⁸ Bentuk-bentuk kekerasan politik dalam pemilu lainnya ialah perusakan fasilitas fisik pemilu, pemukulan, pembunuhan lawan politik dan huru-hara politik. Pengulangan pencoblosan, pengulangan proses perhitungan suara, politik uang yang masih berlaku di beberapa daerah, kecurangan dalam perhitungan suara, adanya saling hujat antar pendukung partai. Dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang lebih ekstrim. Yang kesemuanya termasuk dalam kemungkar.

⁶Johan Galtung, *Violence, Peace, and Peace Research*, Ibid, hal. 168-169

⁷Arbi Sanit (B), *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91

⁸*Ibid*, hlm. 86.

Terjadinya berbagai tindak kekerasan, tidak bisa melepaskan diri dari peran negara terhadap terjadinya kekerasan negara (kekerasan terorganisir). Karenanya kekerasan negara merupakan jenis kekerasan yang perlu mendapat perhatian serius dari kalangan sipil. Sebab kekerasan negara memiliki kekuatan destruktif sangat besar dibandingkan dengan kekerasan tidak terorganisir. Kekerasan ini sulit ditembus oleh kekuatan moral dan sosial karena hambatan justifikasi politik hukum yang melekat di dalamnya.⁹

Dalam percaturan politik Indonesia saat ini, kekerasan adalah sebuah kata klasikal yang tak asing lagi bagi pendengaran kita. Kata ini mengingatkan kita pada situasi yang kasar, sadis, menyakitkan dan menimbulkan efek negatif. Atau yang biasa diterjemahkan dari bahasa asing (Inggris) *violence*. Kekerasan menunjukkan kata keras, pemaksaan, paksaan.¹⁰

Johan Galtung juga memaparkan bahwa ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan terjadinya kekerasan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang merupakan konsep kekerasan structural. Model kekerasan yang model seperti ini ditunjukkan oleh rasa tidak aman karena tekanan yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter. Kalau di analisis dengan politik kekerasan yang sudah terjadi desa ketapang laok sangatlah cocok, karena kekerasan terjadi yang sampai ada jatuhnya korban atau ada pembunuhan itu semua salah satunya karena ketidakadilan yang diciptakan oleh salah satu calon kepala desa dimana politiknya

⁹Lambang Triyono, Baca *Wacana Kekerasan Dalam Masyarakat Transisi*, Yogyakarta : Insist, Edisi 9 tahun III. 2002, hlm. 75.

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985. Hlm.717.

efektif untuk menjadi sarana mobilisasi, peningkatan militansi, materi doktrinasi maupun pemicu aksi.

Kekerasan Horizontal adalah kepentingan pengakuan eksistensi, kepemilikan, ‘penegakan’ hukum/nilai (adat, agama, negara) atau konsensus, diluar dari apa yang secara resmi mengikat dan sah (beberapa argumentasi ‘alasan’ agama tidak bisa menjadi pembenar ‘kekerasan’ dalam satu Negara yang sistem politiknya sekuler misalnya). Contoh kasus kekerasan semacam ini adalah pelanggaran pidana (kriminal), pelanggaran perdata, pelanggaran pemenuhan hak-hak (hak publik, hak pribadi, hak karena ikatan tertentu). Tindakan terhadap diri sendiri (bunuh diri dan pencideraan misalnya) juga merupakan bagian dari pelanggaran ini.

Karenanya solusi efektif dari kekerasan Horizontal adalah penegakan Hukum, Reparasi hak-hak korban, Reinterpretasi atau penguatan hukum dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kelemahan atau ketiadaan hukum, serta perumusan konsensus normatif baru. Dalam kasus kekerasan yang berlarut-larut, biasanya terjadi karena ketiadaan, ketidaktegasan, ketidakjelasan atau ketidakadilan dari proses hukum.

Ketiga, Kekerasan sebagai “reaksi normal dalam situasi tidak normal” Kekerasan semacam ini merupakan peristiwa yang tidak mendapat tempat khusus dan eksplisit dalam kajian-kajian di atas, padahal persoalan yang terjadi nyata dan massif. Pengalaman kekerasan di wilayah konflik ataupun kekerasan dengan konteks tertentu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Lailatin Fajriyah, yang berjudul “Kekerasan Politik dalam pemilihan umum tahun 1999 di Semarang”. Model kekerasan politik di Dongos terjadi secara beruntun dan dalam waktu yang singkat. Hal ini terjadi dipicu oleh konflik antar pendukung partai politik dalam pemilu tahun 1999. Menurutnya, konflik kekerasan politik di Dongos tidak terjadi dengan sendirinya, namun dibalik kekerasan politik itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan tersebut. Antara lain, perubahan psikologis massa, ideologisasi agama, tranformasi social politik massa Nahdlatul Ulama, kesenjangan ekonomi, euforia politik, dan kedekatan ideologi antar partai.¹⁴ Dongos yang berubah menjadi kekerasan politik keagamaan, bukan konflik yang dipicu oleh perbedaan agama. Konflik itu terjadi antara simpatisan partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sama-sama sebagai warga Nahdlatul Ulama.¹⁹ Termasuk dalam kekerasan horizontal. Oleh karenanya, berpijak dari kilas balik sejarah peradaban Islam, uraian Arbi Sanit, dan Lailatin penulis bermaksud membahas tentang kekerasan politik dalam pemilu tahun 1999 di Semarang. Dari segi letak geografis, kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan politik berbeda dengan ketiga pembahasan terebut di atas. Sehingga besar

¹⁴Lailatin Fajriyah “*Kekerasan Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 di Semarang*” (Semarang: UIN Walisongo, 2003).

Persamaan : persamaan yang ada antara skripsi peneliti dengan skripsi di atas ini yakni sama sama membahas mengenai kekerasan politik.

Perbedaan : perbedaan antara bahasan di atas dengan bahasan peneliti yakni pada pembahasannya, jika pada bahasan skripsi di atas itu lebih menekankan pada kekerasan politik pada agama, berbeda dengan pembahasan peneliti, kalau peneliti lebih menekankan pada bentuk kekerasan politik dalam pilkades dan motif kekerasannya.